

Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

Shofiyatul Ulya¹, Maysla Rose Dinanti², Raditya Wahyu Saputra³,
Puput Arvinasari⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: shofiyatululya10@students.unnes.ac.id, mayslarosedinanti@students.unnes.ac.id,
rdtyaws@students.unnes.ac.id, puputarvinasari@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received Desember 04, 2025
Revised Desember 15, 2025
Accepted Desember 17, 2025

Keywords:

Affirmation, Disparity,
Education, Equity, Regional
Development.

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of inequality in access to and quality of education between regency and city areas in Central Java, identify the contributing factors, and formulate relevant policy recommendations for achieving educational equity. This research employs a library research method by collecting secondary data from journals, government statistical reports, and official news published between 2022 and 2025. The data were analyzed using a descriptive–qualitative approach by mapping patterns of inequality and linking them with theories of educational equity, human capital, and regional disparity. The findings indicate that educational disparities remain significant, as reflected in the high number of damaged schools and the large population of out-of-school children (ATS), which reaches hundreds of thousands. These conditions negatively affect learning quality, reduce student motivation, and weaken equitable human resource development. The study concludes that educational inequality is influenced by regional fiscal capacity, uneven distribution of resources, and the weakening of affirmative planning. The government needs to implement needs-based budgeting, accelerate school rehabilitation, improve teacher redistribution, and strengthen educational digitalization. The limitation of this study lies in its reliance on secondary data sources, making the accuracy of the findings highly dependent on the quality of available publications.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 04, 2025
Revised Desember 15, 2025
Accepted Desember 17, 2025

Keywords:

Afirmasi, Disparitas,
Pemerataan, Pembangunan
Daerah, Pendidikan.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketimpangan akses dan kualitas Pendidikan antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, mengidentifikasi factor penyebab, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metod *library research* dengan mengumpulkan data sekunder berupa jurnal, laporan stastistik pemerintah, dan berita resmi dari tahun 2022-2025. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dengan memetakan pola ketimpangan dan mengaitkannya dengan teori keadilan Pendidikan, modal manusia, dan ketimpangan wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan Pendidikan masih signifikan, tercermin dari tingginya jumlah sekolah rusak serta angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai ratusan ribu anak. Kabupaten tersebut berdampak pada rendahnya kulitas pembelajaran, menurunnya motivasi belajar, dan melemahkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian



menunjukkan bahwa ketimpangan Pendidikan dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan melemahnya perencanaan afirmatif. Pemerintah perlu menerapkan penganggaran berbasis kebutuhan, mempercepat rehabilitasi sekolah, memperbaiki redistribusi guru, serta menguatkan digitalisasi pendidikan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sumber data yang bergantung pada publikasi sekunder sehingga akurasi sangat dipengaruhi kualitas data yang tersedia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Maysla Rose Dinananti
Universitas Negeri Semarang
Email: mayslarosedinanti@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kebijakan, kapasitas fiskal daerah, dan distribusi sumber daya pendidikan (Hoskins & Janmaat, 2019). Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dasar masih menjadi tantangan struktural di Indonesia, khususnya antara wilayah kabupaten dan kota, yang disebabkan oleh ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber daya pendidik di berbagai daerah (Muchtar et al., 2025). Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan sarana dan prasarana sekolah, di mana sekolah di wilayah tertinggal sering kekurangan fasilitas penunjang pembelajaran yang layak (Sari & Jasiah, 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kesenjangan ini tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga antar kelompok sosial dan antar satuan Pendidikan (Fatricia et al., 2025). Dalam konteks pendidikan dasar, kesenjangan masih tampak jelas antara wilayah perkotaan dan kabupaten, terutama dalam hal akses terhadap layanan pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, kelengkapan fasilitas sekolah, serta mutu sarana dan prasarana pembelajaran (Khairatunnisa et al., 2025).

Salah satu faktor penting yang memperparah ketimpangan tersebut adalah ketidakmerataan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi pendidikan (Aini et al., 2025). Selain itu, digitalisasi pendidikan yang seharusnya menjadi pengungkit pemerataan justru dapat menjadi sumber kesenjangan baru ketika infrastruktur dan kesiapan digital tidak merata antara sekolah di wilayah kota dan kabupaten (van de Werfhorst et al., 2022). Studi Anita dan Astuti menunjukkan bahwa keterbatasan akses *internet*, perangkat digital, serta kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi menyebabkan sekolah di daerah tertentu tertinggal dalam implementasi pembelajaran digital (Anita & Astuti, 2022). Kondisi ini juga ditegaskan oleh Munauwarah dan Achadi, yang menemukan bahwa ketimpangan digital di tingkat SD erat kaitannya dengan minimnya dukungan kebijakan dan kualitas pelatihan bagi guru di daerah (Munauwarah & Achadi, 2023). Selain itu, peran infrastruktur digital menjadi semakin signifikan, terutama setelah pembelajaran berbasis teknologi berkembang pesat. Wideasanti et al. (2025) menggaris bawahi bahwa ketidaksetaraan akses *internet* dan rendahnya literasi digital menghambat pemerataan kualitas pembelajaran, terutama di sekolah dasar yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan.



Di sisi lain, pada level yang lebih luas, Aqil & Khasanah (2025) menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan masih menghadapi kesenjangan sosial yang menyebabkan kelompok tertentu lebih sulit mengakses sumber belajar digital secara optimal. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan dasar tidak hanya dipengaruhi faktor digital, tetapi juga terkait kondisi fisik sekolah dan ketersediaan tenaga pendidik. Ananda, Sulistiya, et al. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dasar pada level nasional umumnya ditandai oleh perbedaan kualitas sarana prasarana, tingkat kerusakan ruang kelas, rasio guru:murid, serta efektivitas pengelolaan sekolah antara wilayah perkotaan dan wilayah yang kurang berkembang.

Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus meneliti Provinsi Jawa Tengah, pola ketimpangan yang ditemukan relevan sebagai gambaran umum mengenai bagaimana disparitas pendidikan dapat terjadi antara wilayah dengan karakteristik pembangunan yang berbeda. Temuan tersebut relevan dengan konteks Jawa Tengah, di mana perbedaan jumlah guru, murid, sekolah, kondisi ruang kelas, serta akses terhadap listrik dan *internet* masih menunjukkan disparitas yang signifikan antara kabupaten dan kota. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis ketimpangan akses dan kualitas sekolah dasar antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memanfaatkan data mengenai jumlah guru, murid, sekolah, akses digital (*internet*, komputer, listrik), serta tingkat kerusakan ruang kelas untuk memberikan gambaran empirik mengenai tingkat ketimpangan yang terjadi. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai distribusi layanan pendidikan dasar dan mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap pemerataan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif dan terukur yang menggambarkan variasi kondisi pendidikan berdasarkan indikator statistik yang dikumpulkan (Andarwulan et al., 2021). Analisis deskriptif kuantitatif berfungsi untuk mengidentifikasi pola dalam data yang menjelaskan kondisi atau fenomena tertentu (Loeb & Dynarski, 2017). Melalui desain deskriptif kuantitatif, penelitian dapat mengidentifikasi perbedaan pola akses, ketersediaan sumber daya pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana yang terjadi antarwilayah secara sistematis.

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai publikasi resmi, seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan pemerintah terkait pendidikan dasar. Variabel yang dikaji meliputi jumlah guru, jumlah murid, jumlah sekolah dasar, akses digital sekolah (ketersediaan *internet*, komputer, dan listrik), serta kondisi fisik ruang kelas yang dikelompokkan ke dalam empat kategori (baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemilihan variabel ini didasarkan pada relevansinya dalam mencerminkan aspek pemerataan sumber daya, kesiapan infrastruktur, dan kualitas lingkungan belajar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dataset pendidikan terbaru yang telah dipublikasikan oleh instansi resmi. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data (data sheet) disusun untuk membantu peneliti dalam mengorganisasi, memverifikasi, dan mengklasifikasikan data sehingga proses pengolahan data

dapat berlangsung secara sistematis dan akurat. Penggunaan instrumen yang terstruktur juga berfungsi untuk mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan reliabilitas data (Obilor & Miwari, 2025). Studi komparatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk membandingkan berbagai aspek pendidikan antarwilayah yang berbeda.

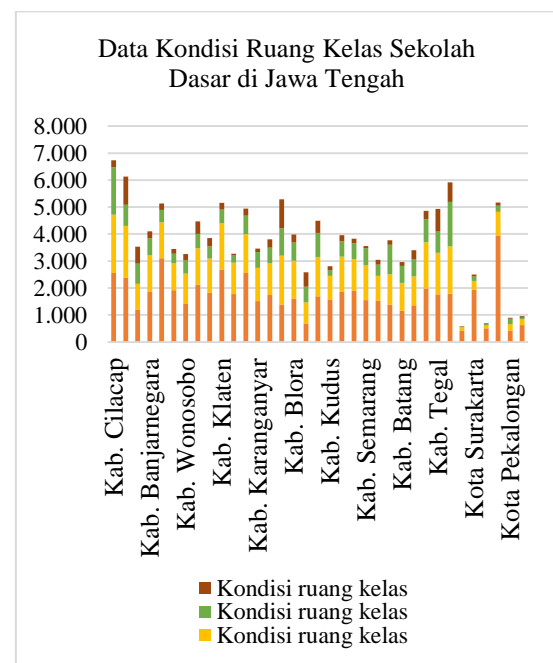
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan indikator pendidikan antara wilayah kabupaten dan kota secara bertahap (Gusriani et al., 2025). Analisis meliputi perhitungan rasio guru:murid, rasio, proporsi tingkat kerusakan ruang kelas, serta tingkat akses digital sekolah. Selain itu, analisis dilakukan dengan menelaah kecenderungan ketimpangan apakah lebih dominan pada aspek akses, ketersediaan tenaga pendidik, kualitas sarana prasarana, atau kesiapan digital sekolah. Hasil olahan data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk memperlihatkan pola ketimpangan yang muncul secara lebih jelas dan informatif. yang bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Desain ini dipilih karena mampu memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pendidikan berdasarkan data statistik resmi.

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024), serta dokumen pemerintah terkait pendidikan dasar. Variabel yang dikaji meliputi jumlah guru, jumlah murid, jumlah sekolah dasar, akses digital sekolah (ketersediaan *internet*, komputer, dan listrik), serta kondisi fisik ruang kelas (baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dataset pendidikan terbaru yang bersumber dari publikasi resmi. Penggunaan data sekunder dalam penelitian pendidikan memungkinkan analisis deskriptif yang sistematis dan komparatif antarwilayah berdasarkan indikator yang terstandar (Jang & Reardon, 2019). Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data (*data sheet*) digunakan untuk mengorganisasi dan mengelompokkan variabel berdasarkan unit wilayah administrasi sehingga proses analisis berjalan sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan indikator-indikator pendidikan antara wilayah kabupaten dan kota. Analisis mencakup perhitungan rasio guru:murid, proporsi kerusakan ruang kelas, serta skor akses digital. Temuan kemudian dinarasikan dan disajikan dalam bentuk tabel untuk menunjukkan pola ketimpangan yang muncul antara kedua kategori wilayah tersebut.

HASIL

Infrastruktur Pendidikan Dasar



Gambar 1. Data Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Jawa Tengah



Berdasarkan Gambar 1, kondisi ruang kelas sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perbedaan yang jelas antara wilayah kabupaten dan kota. Secara umum, wilayah kabupaten memiliki jumlah ruang kelas rusak berat yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kota. Kabupaten Brebes tercatat memiliki 731 ruang kelas rusak berat, Kabupaten Tegal sebanyak 823 ruang kelas rusak berat, dan Kabupaten Grobogan mencapai 1.069 ruang kelas rusak berat, yang merupakan salah satu angka tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Sebaliknya, wilayah kota menunjukkan jumlah ruang kelas rusak berat yang jauh lebih rendah, seperti Kota Magelang dengan 8 ruang kelas rusak berat, Kota Salatiga sebanyak 25 ruang kelas rusak berat, dan Kota Tegal sebanyak 64 ruang kelas rusak berat. Selain itu, Kota Semarang memiliki 3.949 ruang kelas dalam kondisi baik, yang menunjukkan dominasi fasilitas ruang kelas layak di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah kabupaten.

Distribusi Guru dan Peserta Didik

Tabel 1. Jumlah Guru, Sekolah, dan Murid di Jawa Tengah

Jenjang	Wilayah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid: Guru
SD	Kabupaten	17.542	138.155	2.343.315	1:17
	Kota	1.147	14.168	249.521	1:18

Tabel 1 menyajikan data jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan wilayah kabupaten dan kota. Pada jenjang sekolah dasar, wilayah kabupaten memiliki 17.542 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 138.155 orang dan total murid 2.343.315 orang. Rasio murid–guru di wilayah kabupaten adalah 1:17. Sementara itu, wilayah kota memiliki 1.147 sekolah dasar dengan jumlah guru sebanyak 14.168

orang dan total murid 249.521 orang. Rasio murid–guru di wilayah kota tercatat sebesar 1:18. Data ini menunjukkan adanya perbedaan struktur distribusi guru dan peserta didik antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Akses Digital Sekolah Dasar

Tabel 2. Data Akses Digital SD di Jawa Tengah

Akses Digital	Daerah				Rasio tidak tersedia akses digital
	Kabupaten		Kota		Kab:Kota
	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak tersedia	
Internet	17.260	365	1.140	4	89:1
Listrik	17.607	9	1.143	1	9:1
Komputer	970	16.646	126	1.018	16,35:1

Tabel 2 menyajikan data akses digital sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan wilayah kabupaten dan kota. Pada indikator akses internet, wilayah kabupaten memiliki 17.260 sekolah yang telah terhubung internet dan 356 sekolah yang belum memiliki akses. Sementara itu, wilayah kota memiliki 1.140 sekolah dengan akses internet dan 4 sekolah yang belum terhubung internet. Rasio ketidaksediaan akses internet antara kabupaten dan kota mencapai 89:1.

Pada indikator akses listrik, tercatat 17.607 sekolah dasar di wilayah kabupaten dan 1.143 sekolah di wilayah kota telah memiliki akses listrik. Namun demikian, masih terdapat 9 sekolah di kabupaten dan 1 sekolah di kota yang belum teraliri listrik. Rasio ketidaksediaan akses listrik antara kabupaten dan kota sebesar 9:1. Selanjutnya, pada indikator ketersediaan komputer, sebanyak 970 sekolah dasar di wilayah kabupaten tercatat memiliki perangkat komputer, sementara 16.646 sekolah belum memilikinya. Di wilayah kota, 126 sekolah memiliki komputer dan



1.018 sekolah belum memiliki perangkat tersebut. Rasio ketidaktersediaan komputer antara wilayah kabupaten dan kota mencapai 16,35:1. Data ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketersediaan akses digital antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Infrastruktur Pendidikan Dasar

Perbedaan kondisi ruang kelas antara wilayah kabupaten dan kota tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan akses terhadap infrastruktur pendidikan yang memadai. Kota-kota besar seperti Kota Semarang menunjukkan kemampuan pemeliharaan sarana pendidikan yang lebih optimal dibandingkan wilayah kabupaten, yang cenderung menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal serta cakupan wilayah sekolah yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadillah et al. yang menyatakan bahwa wilayah dengan kapasitas pendanaan terbatas lebih rentan mengalami kerusakan sarana prasarana dan keterlambatan dalam proses perbaikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan Ulfian & Jakaria yang menegaskan bahwa sarana dan prasarana fisik memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas proses pembelajaran. Ruang kelas yang mengalami kerusakan berat maupun sedang berpotensi mengganggu kenyamanan belajar, menurunkan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik, serta berdampak pada capaian hasil belajar.

Dari perspektif perencanaan pendidikan, Nelliraharti & Jarmita menekankan bahwa ketimpangan infrastruktur dapat diminimalkan melalui perencanaan sarana dan prasarana yang sistematis dan berkelanjutan, termasuk pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi wilayah. Dalam konteks Jawa Tengah, kabupaten seperti Grobogan, Tegal, Brebes, dan Purbalingga menunjukkan

kebutuhan prioritas dalam pemulihan ruang kelas rusak, sehingga perencanaan anggaran pendidikan perlu lebih terarah pada wilayah-wilayah tersebut.

Lebih lanjut, pola ketimpangan antara wilayah kabupaten dan kota ini juga sejalan dengan kajian Nelliraharti & Jarmita yang menemukan bahwa wilayah pedesaan atau kabupaten sering menghadapi kendala dalam manajemen infrastruktur pendidikan, mulai dari minimnya pendanaan, keterbatasan sektor perawatan bangunan sekolah, hingga distribusi sarana yang tidak merata. Kondisi tersebut tercermin pada data ruang kelas di Jawa Tengah, di mana beban kerusakan cenderung terkonsentrasi di wilayah kabupaten.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan dasar di Jawa Tengah masih mengalami ketimpangan yang cukup signifikan antara kabupaten dan kota. Kabupaten menanggung beban kerusakan ruang kelas yang lebih tinggi, sementara kota memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik dan terawat. Kondisi ini memperkuat urgensi pemerataan pembiayaan pendidikan serta percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya di wilayah kabupaten yang memiliki risiko paling besar terhadap penurunan kualitas layanan pendidikan dasar.

Distribusi Guru dan Peserta didik

Distribusi guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas layanan pendidikan dasar. Meskipun perbedaan rasio murid-guru antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tampak relatif kecil, kondisi riil menunjukkan bahwa kebutuhan guru di wilayah kabupaten lebih besar. Hal ini disebabkan oleh jumlah sekolah yang jauh lebih banyak serta cakupan wilayah geografis yang lebih luas, sehingga distribusi dan pemerataan guru menjadi tantangan tersendiri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kartika et al. yang mengkaji



distribusi guru di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa disparitas jumlah guru masih terjadi antarwilayah kecamatan akibat variasi jumlah sekolah, kondisi demografis, serta kebutuhan layanan pendidikan di masing-masing wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan distribusi guru tidak hanya terjadi antarprovinsi atau antarkabupaten, tetapi juga pada skala yang lebih kecil, seperti tingkat kecamatan.

Selain itu Innayatun Nur & Wibowo Arimenegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar, terutama ketika beban mengajar tidak proporsional antarwilayah. Studi Ananda, Khairani, et al. juga menekankan bahwa rasio murid:guru merupakan salah satu indikator penting pemerataan pendidikan, di mana rasio yang lebih ideal dapat meningkatkan intensitas interaksi guru dengan peserta didik serta menurunkan beban kerja guru.

Dalam konteks penelitian ini, beban guru di wilayah kota cenderung lebih tinggi karena rasio murid per guru lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten. Namun demikian, guru di wilayah kabupaten menghadapi tantangan lain berupa mobilitas yang tinggi, jarak antarsekolah yang jauh, serta kekurangan guru di sekolah-sekolah tertentu, khususnya di daerah pinggiran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru dan peserta didik di Jawa Tengah tidak hanya tercermin dari perbedaan angka statistik, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang berimplikasi langsung terhadap kualitas layanan pendidikan dasar.

Oleh karena itu, pemerataan distribusi guru menjadi isu strategis yang perlu ditangani melalui kebijakan penyebaran guru yang lebih efektif, pemerataan rekrutmen tenaga pendidik, serta pemberian insentif bagi guru yang

bertugas di wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Akses Digital Sekolah Dasar

Akses digital merupakan komponen penting dalam mendukung kualitas pembelajaran pada era transformasi teknologi pendidikan. Ketimpangan akses internet, listrik, dan perangkat komputer antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital masih belum merata. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan infrastruktur digital yang berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan dasar.

Ketimpangan akses internet yang cukup tinggi, khususnya di wilayah kabupaten, mendukung temuan Aini et al. yang menyatakan bahwa *digital divide* masih sangat terasa di sektor pendidikan, terutama di wilayah nonperkotaan yang belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai. Keterbatasan akses internet menghambat pemanfaatan sumber belajar digital serta penerapan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar.

Meskipun akses listrik di Jawa Tengah relatif lebih merata dibandingkan indikator digital lainnya, ketiadaan listrik pada sejumlah sekolah tetap menjadi hambatan fundamental. Tanpa listrik, sekolah tidak dapat mengoperasikan perangkat digital maupun mengakses jaringan internet. Hal ini sejalan dengan temuan Rahma & Kartiasih yang menegaskan bahwa infrastruktur TIK, termasuk listrik, memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendidikan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Kesenjangan yang paling menonjol terlihat pada ketersediaan perangkat komputer. Rendahnya kepemilikan komputer di sekolah-sekolah kabupaten menunjukkan bahwa keberadaan jaringan internet saja tidak cukup untuk mendukung



pembelajaran digital. Kondisi ini memperkuat argumen Widiasanti et al. bahwa ketimpangan akses digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan, tetapi juga kesiapan perangkat dan kompetensi digital sekolah.

Secara keseluruhan, ketimpangan akses digital di Jawa Tengah mencerminkan pola kesenjangan digital yang juga terjadi secara nasional. Wilayah kabupaten masih menghadapi keterbatasan pada aspek infrastruktur dan perangkat digital, sementara wilayah kota cenderung lebih siap dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Jika dibandingkan dengan ketimpangan infrastruktur fisik dan distribusi guru, akses digital merupakan salah satu aspek yang paling timpang dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemerataan akses internet, penyediaan perangkat komputer, serta penguatan literasi digital menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan kualitas layanan pendidikan dasar.

Penyebab dan Dampak Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah muncul akibat sejumlah faktor struktural yang saling berkaitan. Ketimpangan infrastruktur fisik menjadi penyebab utama, ditandai dengan masih tingginya jumlah ruang kelas rusak di wilayah kabupaten dibandingkan kota, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam melakukan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata memperburuk kualitas layanan pendidikan; jumlah sekolah di kabupaten yang jauh lebih besar membuat penempatan guru menjadi tidak proporsional, sehingga beberapa sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik meskipun rasio murid:guru secara agregat tampak cukup baik. Faktor berikutnya adalah kesenjangan akses digital yang sangat menonjol, terutama pada

ketersediaan *internet* dan perangkat komputer. Data menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah di kabupaten belum memiliki komputer dan masih terdapat sekolah tanpa akses *internet*, sehingga pembelajaran berbasis teknologi sulit diterapkan secara merata. Ketimpangan ini selaras dengan teori *digital divide* yang menyatakan bahwa perbedaan akses terhadap teknologi akan menghasilkan perbedaan kualitas pembelajaran dan peluang akademik.

Kondisi ketidakmerataan tersebut menghasilkan berbagai dampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Keterbatasan ruang kelas layak, distribusi guru yang tidak ideal, serta kurangnya fasilitas digital menghambat efektivitas proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pengalaman belajar siswa di wilayah kabupaten. Sekolah-sekolah di daerah dengan sarana terbatas cenderung mengalami capaian belajar lebih rendah, sehingga menciptakan disparitas hasil belajar yang berkelanjutan antarwilayah.

Selain itu, kesenjangan akses digital menyebabkan siswa di kabupaten tertinggal dalam penguasaan literasi digital, padahal kompetensi ini semakin menjadi prasyarat dalam kurikulum modern. Guru di sekolah tertentu juga menghadapi beban kerja berlebih akibat kekurangan guru, yang berpotensi menurunkan intensitas interaksi pedagogis dengan peserta didik. Secara teoritis, ketimpangan ini sejalan dengan teori Bourdieu tentang modal pendidikan, yang menjelaskan bahwa siswa dari lingkungan dengan sumber daya pendidikan lebih baik (modal kultural dan modal institusional) cenderung memiliki peluang akademik lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada dalam lingkungan dengan modal pendidikan rendah. Dengan demikian, ketimpangan sarana, pendidik, dan akses digital tidak hanya memengaruhi proses pembelajaran jangka pendek, tetapi juga memperkuat reproduksi ketidaksetaraan pendidikan antarwilayah dalam jangka panjang.



KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar antara wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki implikasi penting terhadap pemerataan mutu pembelajaran dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan kapasitas fiskal daerah berdampak langsung pada kualitas infrastruktur sekolah, distribusi guru, serta kesiapan digital, di mana sekolah-sekolah di wilayah kabupaten masih menghadapi keterbatasan ruang kelas layak, perangkat teknologi, dan akses internet yang memadai.

Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga struktural dan digital, sehingga berpotensi memperlebar disparitas capaian belajar antarwilayah jika tidak ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data primer melalui survei lapangan dan wawancara guna memperkaya pemahaman empiris mengenai pengalaman guru dan siswa, serta memasukkan indikator kualitas pedagogi dan efektivitas kebijakan afirmatif. Secara praktis, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat penganggaran berbasis kebutuhan wilayah, mempercepat rehabilitasi sarana pendidikan, melakukan redistribusi guru yang lebih adil, serta meningkatkan penyediaan infrastruktur dan literasi digital agar transformasi pendidikan dapat berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Z., Safitri, D., & Sujarwo. (2025). Menelisik Kesenjangan Digital Yang Tidak Merata Pada Pendidikan Di Indonesia. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 14(1).
- Ananda, R., Khairani, M., Putri, N. A. A., Pratiwi, N., & Anggraini, T. (2025). Analisis Kompetensi Dan Ketersediaan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Ananda, R., Sulistiya, A., Zulhafmi, A., Hamda, N. A., & Abdullah, R. (2025). Masalah Kesenjangan (Gap) Pendidikan Sekolah Dasar Antara Sekolah Dipertanian Dan Daerah-Daerah 3T. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Andarwulan, T., Al Fajri, T. A., & Damayanti, G. (2021). Elementary Teachers' Readiness toward the Online Learning Policy in the New Normal Era during Covid-19. *International Journal of Instruction*, 14(3), 771–786. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14345a>
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>
- Aqil, M. N., & Khasanah, N. (2025). Ketimpangan Ketimpangan Sosial dalam Akses dan Praktik Pendidikan Digital di Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika*, 6(11).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Provinsi*.
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis Ketimpangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Daerah Pedesaan. *Jurnal Adijaya Multidisiplin*, 3(2).
- Patricia, A. N., Febrian, S., & Ananda, R. (2025). Kebijakan Dan Permasalahan Akses Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Gusriani, A., Ash-Shiddiqy, A. R., Dahniar, D., Hastuti, D. D., Agustina, E., Ester, E., & Nur, F. (2025). Studi Komparatif: Menilik Perbedaan dan Persamaan Pendidikan di Indonesia dan Jepang. *ALACRITY: Journal of Education*, 855–867.



- <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.771>
- Hoskins, B., & Janmaat, J. G. (2019). *Education, Democracy and Inequality*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-48976-0>
- Innayatur Nur, & Wibowo Ari. (2024). The Impact Of Unequal Distribution Of Teachers On The Quality Of Education In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3).
- Jang, H., & Reardon, S. F. (2019). States as Sites of Educational (In)Equality: State Contexts and the Socioeconomic Achievement Gradient. *AERA Open*, 5(3). <https://doi.org/10.1177/2332858419872459>
- Kartika, D. I., Asril, M., Maharani, R., Avenia Nini Lamak, Y., Novelus Awacke Jocku, A., & Seran, R. (2025). Analisis Ketersediaan dan Distribusi Guru di Sekolah Negeri Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 109–120. <https://doi.org/10.70427/smartdedication.v2i1.132>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah: Sarana dan Prasarana*.
- Khairatunnisa, Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). Analisis Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 8(6).
- Loeb, S., & Dynarski, S. (2017). *Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers*.
- Muchtar, C. O., Purba, A. A., Sitorus, J. S., Siagian, M. F., Harahap, N. M., Ginting, R. A., Bangun, M. B., & Muchtar, Z. (2025). Systematic Literature Review: Examining Indonesia's Educational Inequality Factors and Government Equity Policies. *International Journal of Educational Practice and Policy*, 3(1), 8–16.
- Munauwarah, R., & Achadi, Muh. W. (2023). Identifikasi Kebijakan Digitalisasi dan Ketimpangan Pendidikan (Studi Kasus Guru Sekolah Dasar Kecamatan Raba Kota Bima). *ALSYS*, 3(4), 312–325. <https://doi.org/10.58578/alsys.v3i4.1196>
- Nelliraharti, & Jarmita, N. (2025). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Journal of Education Science*, 11(1).
- Obilor, E. I., & Miwari, G. U. (2025). Establishing the Reliability of Data Collection Instruments. *International Journal of Research*, 12(1).
- Rahma, S. F., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh Infrastruktur Transportasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Ketimpangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 153–170. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.453>
- Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun Pendidikan Berkeadilan: Mengatasi Masalah Pemerataan Pendidikan Antara Daerah dan Perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1723–1731. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>
- Ulfian, E., & Jakaria. (2025). Studi Literatur: Peran Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- van de Werfhorst, H. G., Kessenich, E., & Geven, S. (2022). The digital divide in online education: Inequality in digital readiness of students and schools. *Computers and Education Open*, 3, 100100. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100100>



Widiasanti, I., Rahmadani, S., Nur, D. A.-
Z., Nafi'atussalwa Nafi'atussalwa,
Lestari, N. P., & Syaidah, S. (2025).
Kesetaraan Akses Internet dan
Tantangan Literasi Digital di
Indonesia. *Jurnal Pendidikan
Tambusai*, 9(2).